

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi suatu wilayah pada hakekatnya merupakan suatu satuan kegiatan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (adi, 2006). Tolak ukur pembangunan ekonomi suatu negara atau wilayah adalah pertumbuhan ekonomi. Pembangunan ekonomi tak terlepas dari pertumbuhan ekonomi yaitu pembangunan ekonomi mendorong pertumbuhan ekonomi dan sebaliknya pertumbuhan ekonomi memperlancar pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi digunakan sebagai ukuran atas perkembangan atau kemajuan perekonomian suatu wilayah (Mohammad et al,2013).

Menurut Sukirno (2008), pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi bertambah dan kemakmuran meningkat. Perkembangan ekonomi suatu negara yang diukur dengan pertumbuhan ekonomi menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian dalam selang waktu tertentu. Laju pertumbuhan ekonomi dapat dilihat melalui alat ukur, yaitu *Produk Domestik Bruto (PDB)* yang digunakan untuk tingkat nasional sedangkan *Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)* digunakan untuk tingkat daerah (Boediono 1981: 1).

Tabel 1.1
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar
Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha
Kota Kupang Periode 2008-2017

(Juta Rupiah)

Tahun	PDRB Kota Kupang
2008	1.999.694,47
2009	2.122.333,68
2010	9.066.269,59
2011	9.867.235,80
2012	10.609.469,26
2013	11.373.405,03
2014	12.147.981,01
2015	12.953.526,22
2016	13.826.040,90
2017	14.770.640,80

Sumber : Badan Pusat Statistik

Dari Tabel 1.1 dapat disimpulkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi Kota Kupang yang ditunjukkan dari PDRB Atas Dasar Harga Konstan menurut lapangan usaha mengalami peningkatan setiap tahunnya. PDRB adalah nilai keseluruhan barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu wilayah pada satu jangka waktu tertentu. PDRB digunakan sebagai, a) indikator untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi suatu daerah; b) bahan analisis tingkat kemakmuran masyarakat dan tingkat perubahan barang dan jasa; c) bahan analisis produktivitas secara sektoral; dan d) alat kontrol dalam menentukan kebijakan pembangunan.

Penyelenggaraan otonomi daerah yang dimulai pada Januari 2001 Dari aspek ekonomi, kebijakan otonomi daerah yang bertujuan untuk pemberdayaan kapasitas daerah akan memberikan kesempatan bagi daerah untuk mengembangkan dan meningkatkan perekonomiannya. Peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah akan membawa pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah. oleh karena itu diharapkan pemerintah daerah agar mampu

mengembangkan potensi yang dimiliki guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi, Menurut Keynes dan Sadono Sukirno (2000) bahwa peran campur tangan pemerintah masih sangat diperlukan yaitu apabila perekonomian sepenuhnya diatur oleh pasar bebas, bukan saja perekonomian tidak mencapai tingkat kesempatan kerja penuh tetapi juga kestabilan kegiatan ekonomi tidak dapat diwujudkan.

Untuk mempromosikan pertumbuhan ekonomi dan menjaga kestabilan kegiatan ekonomi pemerintah membuat kebijakan fiskal yaitu suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah setiap tahunnya, yang tercermin dalam dokumen Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk nasional dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk daerah. Menurut Permendagri Nomor 13/2016 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, sistem belanja pemerintah daerah dikenal dengan belanja langsung dan belanja tidak langsung.

- a. Belanja tidak langsung adalah bagian belanja yang dianggarkan tidak terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Seperti belanja pegawai berupa gaji dan tunjangan yang telah ditetapkan oleh undang-undang, belanja bunga, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa, belanja bantuan keuangan dan belanja tak terduga.
- b. Belanja langsung adalah belanja yang dianggarkan yang terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Seperti belanja pegawai,

belanja barang dan jasa, serta belanja modal untuk melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah dan telah dianggarkan oleh pemerintah daerah.

Perkembangan pengeluaran pemerintah yang diukur dari besarnya belanja Langsung dan Belanja Tak Langsung Kota Kupang dari tahu 2008 s/d 2017 dapat dilihat dalam Tabel 1.2.

Tabel 1.2
Realisasi Belanja Pemerintah Kota Kupang menurut
Jenis Belanja (Ribuan Rupiah),
Tahun 2008-2017

Tahun	Belanja Tidak Langsung	Belanja Langsung	Total
2008	295.634.160	180.432.881	476.067.040
2009	296.126.596	187.215.063	483.341.659
2010	348.169.003	209.444.987	557.613.990
2011	398.815.346	194.084.225	592.899.571
2012	484.778.576	189.399.206	674.177.782
2013	537.572.628	258.899.845	796.652.473
2014	574.625.071	327.845.404	902.470.475
2015	618.720.916	373.344.823	992.065.739
2016	674.389.624	498.852.509	1.173.242.133
2017	474.904.703	681.923.151	1.156.827.854

Sumber : BPS Kota Kupang

Berdasarkan tabel 1.2, diketahui belanja pemerintah daerah Kota Kupang cenderung mengalami peningkatan dari tahun 2008 sebesar 476.067.040 dan pada tahun 2016 sebesar 1.173.242.133 namun pada tahun 2017 pengeluaran pemerintah menurun menjadi 1.156.827.854. Ini disebabkan karena penurunan pengeluaran pemerintah pada belanja tidak langsung terkhususnya belanja pegawai yaitu pada tahun 2016 sebesar 616.947.043 dan menurun pada tahun 2017 menjadi

426.569.163, sedangkan pada belanja langsung terkhususnya belanja belanja pegawai pada tahun 2016 sebesar 53.722.409 dan pada tahun 2017 sebesar 139.121.411.

Diharapkan dengan peningkatan pengeluaran pemerintah kota kupang yang selalu meningkat tiap tahunnya ini dapat dimaksimalkan dengan baik agar pertumbuhan ekonomi dapat meningkat pesat dan kesejahteraan masyarakat terjamin.

Salah satu faktor yang berpengaruh dalam pertumbuhan ekonomi adalah sumber daya manusia yang ada di suatu wilayah. Penduduk yang bertambah dari waktu ke waktu dapat menjadi pendorong maupun penghambat kepada pertumbuhan ekonomi. Penduduk yang bertambah akan memperbesar jumlah tenaga kerja, dan penambahan tersebut memungkinkan suatu daerah untuk menambah produksi. Namun di sisi lain, akibat buruk dari penambahan penduduk kepada pertumbuhan ekonomi dihadapi oleh masyarakat yang tingkat pertumbuhan ekonominya masih rendah. Hal ini berarti bahwa kelebihan jumlah penduduk tidak seimbang dengan faktor produksi lain yang tersedia dimana penambahan penggunaan tenaga kerja tidak akan menimbulkan penambahan dalam tingkat produksi. Gambaran mengenai jumlah angkatan kerja di Kota Kupang dapat dilihat pada Tabel 1.3

Tabel 1.3
 Angkatan Kerja Kota Kupang
 Tahun 2008-2017

Tahun	Angkatan Kerja (jiwa)		Total Angkatan Kerja
	Bekerja	Pengangguran	
2008	109.329	17.650	126.979
2009	110.648	18.433	129.081
2010	124.198	17.877	142.075
2011	129.745	15.656	145.401
2012	135.501	14.985	149.986
2013	137.107	13.650	150.787
2014	137.367	17.644	155.011
2015	132.811	22.065	154.876
2016	133.427	22.268	155.695
2017	157.119	22.442	179.561

Sumber : BPS Kota Kupang

Dari Tabel 1.4 bisa dilihat bahwa jumlah angkatan kerja setiap tahunnya meningkat namun tidak semuanya diserap oleh pasar kerja sehingga pengangguran setiap tahunnya terus meningkat. Hal ini menunjukkan belum terserap secara maksimal angkatan kerja di Kota Kupang sehingga pemerintah perlu lebih berupaya dengan membuka lapangan kerja baru dan memanfaatkan potensi yang ada di daerah. Lapangan Usaha yang paling banyak menyerap tenaga kerja adalah sektor jasa kemasyarakatan, sosial, dan perorangan (BPS Kota Kupang,2017).

Melihat fenomena dari Kota Kupang Yang memiliki laju Pertumbuhan Ekonomi yang lambat (dilihat dari pendapatan perkapita) , belanja daerah yang setiap tahunnya terus meningkat, serta belum maksimalnya angkatan kerja yang terserap dalam pasar kerja, maka kiranya perlu diteliti lebih mendalam pengaruh yang timbul dari belanja daerah dan angkatan kerja terhadap pertumbuhan ekonomi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis mengidentifikasi permasalahannya sebagai berikut :

1. Apakah Belanja Daerah dan Angkatan Kerja secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Petumbuhan Ekonomi di Kota Kupang?
2. Apakah Belanja Daerah dan Angkatan Kerja secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Petumbuhan Ekonomi di Kota Kupang?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Belanja Daerah dan Angkatan Kerja secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Petumbuhan Ekonomi di Kota Kupang
2. Untuk mengetahui Belanja Daerah dan Angkatan Kerja secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Petumbuhan Ekonomi di Kota Kupang

1.3.2 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah :

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan bagi pihak-pihak yang terkait khususnya pemerintah dalam menentukan langkah - langkah dan merumuskan kebijakan - kebijakan yang terkait dengan pengambilan keputusan dalam perekonomian Indonesia.

2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi wacana yang baik untuk menambah informasi dan wawasan bagi para pembaca yang tertarik kondisi pertumbuhan ekonomi Kota Kupang dan bagi peneliti.
3. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai referensi bagi peneliti yang lain yang sedang meneliti topik yang berkaitan dengan penelitian ini, atau sebagai bahan acuan dan perbandingan untuk penelitian selanjutnya.